



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, BNP2TKI, PT ASKES, DAN PT. JAMSOSTEK)**

Tahun Sidang : 2008-2009
Masa Persidangan : II
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Rabu, 3 Desember 2008
Pukul : 09.00 WIB – selesai
Acara : 1. Membicarakan Hasil Kunjungan Kerja Komisi IX pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2008-2009
2. Membicarakan masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas Depnakertrans RI (SKB 4 Menteri)
3. Lain-lain

Ketua Rapat : Dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota : 39 orang anggota dari 50 Anggota Komisi IX DPR RI, ijin 11 orang.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dibuka pukul 10.00 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 99 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN

Paparan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tentang Kinerja Depnakertrans RI Tahun 2008, Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI dan Berbagai Masalah Aktual yang berkaitan dengan bidang tugas Depnakertrans RI, Penjelasan mengenai SKB 4 Menteri, Antisipasi Depnakertrans RI terhadap gelombang aksi PHK Masal, serta Program Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) (seperti diuraikan dalam materi paparan)

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN :

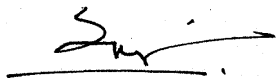
Setelah menerima masukan/tanggapan Anggota serta jawaban Menakertrans, maka Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada hari ini mengambil Kesimpulan/Keputusan, sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI mendukung surat Ketua DPR RI No.TU 03/8589/DPR RI/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008 dan mendesak Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja R.I untuk mencabut Peraturan Bersama 4 Menteri tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global.
2. Komisi IX DPR RI mendesak DEPNAKERTRANS RI segera merevisi Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek khususnya ketentuan yang mengatur masa tunggu pengambilan JHT Jamsostek bagi pekerja yang ter PHK, dari 6 bulan menjadi 1 bulan.
3. Komisi IX DPR RI mendukung DEPNAKERTRANS R.I untuk melakukan penyesuaian program dan anggaran belanja antar program, antar kegiatan kearah kegiatan yang secara langsung dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar terutama untuk mengantisipasi ledakan pengangguran akibat krisis ekonomi global.
4. Komisi IX DPR RI mendorong DEPNAKERTRANS R.I untuk memetakan secara nasional potensi PHK akibat krisis ekonomi termasuk melakukan pemetaan potensi pekerja yang akan di PHK agar pemerintah dapat melakukan langkah-langkah pendampingan dan intervensi yang tepat terhadap pekerja pasca PHK
5. Komisi IX DPR RI dan DEPNAKERTRANS RI sepakat agar Panja TKI Komisi IX DPR RI lebih memfokuskan evaluasi terhadap kinerja Konsorsium Asuransi TKI dan keberadaan Terminal IV Sela Panjang mengingat masih buruknya kualitas pelayanan dan perlindungan TKI.
6. Komisi IX DPR RI meminta DEPNAKERTRANS R.I untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mempercepat penyelesaian kasus perselisihan di PT Angkasa Pura I, penyelesaian hak-hak 143 orang mantan pekerja PT PAN GAS Nusantara dan pencegahan PHK di PT RAPP, Riau dan perusahaan-perusahaan lainnya di seluruh Indonesia.
7. Komisi IX DPR RI meminta DEPNAKERTRANS R.I dan PT Jamsostek agar mengoptimalkan pemanfaatan dana Jamsostek untuk membantu pekerja yang mengalami PHK akibat krisis ekonomi global.
8. Komisi IX DPR RI mendorong DEPNAKERTRANS RI agar penyelenggaraan Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Yang Bekerja Diluar Hubungan Kerja diatur dan ditingkatkan regulasinya dari Keputusan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB

Jakarta, 3 Desember 2008

MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI RI,



DR. Ir. H. ERMAN SUPARNO, MBA, M.Si

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
K E T U A,



dr. RIBKA TJIPTANING